



PEMERINTAH KOTA METRO  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jl.AH. Nasution No. 05 MetroTelp. (0725) 41001 Fax. (0725) 47423  
www.metrokota.go.id

**NOTULEN RAPAT**

- I. Rapat : Focus Group Discussion Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kota Metro melalui Implementasi Elektrifikasi Transaksi Pendapatan Daerah (IETPD)
- Hari/ Tanggal : Selasa, 2 November 2022  
Waktu : Pukul 08.00 WIB  
Tempat : Aula PEMDA Kota Metro
- II Pimpinan Rapat : Walikota Metro  
Moderator : Sekretaris BPPRD Kota Metro  
Nara Sumber : 1. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia  
2. Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank Pembangunan Daerah Lampung  
3. Plt. Kepala BPPRD Kota Metro
- Peserta Rapat : 1. Sekretaris TP2DD Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kepala Bidang Informasi dan Pendapatan Bapenda Prop. Lampung.  
2. Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.  
3. Para peserta FGD (TP2DD Kota Metro/Kepala OPD terkait).

1. Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Walikota Metro yang dalam arahannya menyampaikan bahwa :
- 1.1 Terselenggaranya FGD ini dapat membuka wawasan seluruh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Metro (TP2DD) khususnya OPD pengelola pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Metro akan pentingnya IETPD pada era Digital saat ini untuk meningkatkan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Metro.
- 1.2 Perkembangan ETPD semester II Tahun 2021 Daerah di Indonesia yang masuk kedalam kategori "Digital" sebanyak 36,7 % dan yang masuk pada kategori "Maju" sebanyak 43,8 %.

- 1.3 Skor indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kota Metro tercatat sebesar 65,6 atau masuk dalam kategori “Maju” untuk masuk kedalam kategori “Digital” pemerintah Kota Metro harus mempersiapkan percepatan IETPD serta mendiskusikan tindak lanjut dan rencana elektronifikasi masing-masing OPD Pengelola Pajak dan Retribusi. OPD dalam pengelolaan pajak dan retribusi diharapkan semua sudah online dan pembayarannya dilakukan secara “Digital” .
2. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia mengawali paparan dengan menyampaikan Digitalisasi Pembayaran untuk Optimalisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dan Akselerasi IETPD Kota Metro. Dengan penjelasan sebagai berikut :
  - 2.1. Dasar Hukum Implementasi ETPD
    - Nota Kesepahaman ETP pada 13 Februari 2020
    - Keputusan Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2021 tentang satuan tugas percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah
  - 2.2. Perkembangan ETPD ditingkat Nasional semester II tahun 2021. Daerah yang masuk kategori “Digital” sebanyak 36,7 % dan Daerah yang masuk kategori “Maju” sebanyak 43,8%.
  - 2.3. Hasil survey IETPD semester I Tahun 2022 untuk wilayah Lampung Kota Metro mendapatkan nilai IETPD sebesar ‘65,6%’ masuk kedalam kategori “Maju”. Hal ini berarti bahwa masih banyak aspek yang perlu untuk terus didorong khususnya pada aspek realisasi dan Implementasi.
  - 2.4. Rekomendasi/usulan koordinasi Tahun 2022 untuk pemerintah daerah sebagai berikut :
    - Ketentuan Daerah terkait pemanfaatan kanal dan setelmen dalam transaksi belanja dan pendapatan daerah perlu menjadi perhatian.
    - Peningkatan kualitas IETPD secara berkelanjutan sebagai alat monitoring implementasi ETPD termasuk melalui pengisian SIP2DD.
    - Mendorong efisiensi dan percepatan proses kerjasama pemerintah daerah dengan PJP dan Platform digital seperti QRIS, e-commerce serta pemanfaatan SIP2DD.



3. Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank Pembangunan Daerah Lampung memaparkan antara lain :
  - 3.1. Bank Lampung siap Mendukung layanan yang inovatif untuk optimalisasi pendapatan secara digital di Kota Metro.
  - 3.2. Bank Lampung terus memperkuat perannya dalam digitalisasi pembayaran dan elektronifikasi layanan transaksi pemerintah daerah melalui perluasan saluran/kanal digital pembayaran dengan QRIS dan e-commerce (Alfamart, Indomart dan Tokopedia).
  - 3.3. Melalui Bank Lampung cabang Kota Metro telah mempersiapkan Bank Lampung Online yang saat ini penginputan sedang dalam proses untuk bisa menerima pembayaran semua pajak dan retribusi secara online melalui aktifasi M-Banking.
  
4. Plt. Kepala BPPRD Kota Metro memaparkan hal sebagai berikut :
  - 4.1. IETPD Kota Metro tercatat sebesar '65,6 %' atau masuk dalam kategori "Maju", Untuk maju menjadi kategori "Digital" Kota Metro membutuhkan nilai  $\pm 15\%$  dan harus mampu memanfaatkan kanal pembayaran Digital termasuk dalam sistem Informasi dan integritasnya.
  - 4.2. Pada semester II Tahun 2021 sampai dengan semester I Tahun 2022 blum ada peningkatan dikarenakan pembayaran masih melalui teller , ATM dan kanal pembayaran belum melalui e-commerce, QRIS serta belum menggunakan SIPD Online.
  - 4.3. Untuk mengoptimisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro kepada seluruh OPD pengelola PAD diharapkan dapat membuat perencanaan dan Implementasi Qris pada setiap pembayaran pajak dan retribusi. Pilot Projeck untuk Qris Retribusi ada 5 OPD yaitu : BPPRD, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan.
  - 4.4. Perencanaan OPD pengelola Retribusi meliputi penatausahaan Retribusi secara Digital untuk cara pembayaran lebih mudah dan minat bayar yang lebih tinggi.
  - 4.5. Waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan perencanaan menuju Digitalisasi ini adalah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 .
  - 4.6. Pembayaran Pajak Asli Daerah dalam hal ini BPPRD bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Lampung cabang Metro sudah bisa diakses melalui pemanfaatan kanal Digital seperti QRIS dan e-commerce (Tokopedia, Indomart ).

Beberapa pertanyaan dan tanggapan dari peserta rapat sebagai berikut :

1. Dinas Perdagangan :

- Bagaimana teknis dan syarat pengajuan QRIS untuk OPD pengelola retribusi dan QRIS apa yang akan digunakan dalam pembayaran retribusi?

Tanggapan dari Bank Lampung atas pertanyaan Dinas Perdagangan yaitu :

- Untuk mengusulkan QRIS, OPD cukup menyurati Bank Lampung permintaan pembuatan QRIS dan Bank Lampung akan datang ke OPD terkait untuk dilakukan proses pembuatannya dengan menyiapkan No. Rek dan No.Tlp .
- QRIS terdiri dari 2 yaitu QRIS Statis dan QRIS Dinamis untuk QRIS statis (tidak ada keterangan atau pemberitahuan siapa yang membayar dan untuk apa), QRIS Dinamis (ada pemberitahuan wajib pajak yang membayar) dan sebaiknya OPD Yang mempunyai Wajib Pajak Tetap, menggunakan QRIS Dinamis.

2. RSUD A.Yani :

- Transaksi Keuangan penerimaan dan pengeluaran RSUD A.Yani menggunakan Bank Lain selain Bank Lampung dikarenakan RSUD A.Yani mempunyai aturan tersendiri dengan adanya QRIS ini apakah harus diganti rekening yang lama ke rekening Bank Lampung?

Tanggapan dari Bank Lampung untuk pengakifan QRIS harus menggunakan rekening Bank Lampung, jadi OPD pengelola retribusi diharapkan semuanya menggunakan rekening Bank Lampung sebagai tempat proses pembayaran.

3. Dinas KOMINFO :

- Keterkaitan dalam penilaian IETPD, Kota Metro optimis bisa masuk kategori "Digital" dengan dukungan dari Bank Lampung dan Bank Indonesia, untuk merubah pola masyarakat dari manual ke digital sedikit susah untuk itu perlu adanya sosialisasi baik dari pihak Bank Lampung dan BPPRD selaku sekretaris TP2DD Kota Metro, terkait sosialisasi tersebut Dinas Kominfo siap membantu mempublikasikan melalui media sosial kominfo seperti Instagram,youtube,WA dll .
- Kesiapan Infrastruktur Lingkungan Strategis OPD itu seperti apa?



- Tanggapan dari Bank Lampung, Untuk Tahun ini Program Bank Lampung yaitu dengan mendatangi secara langsung OPD-OPD Pengelola PAD dan akan terus mensosialisasikan tentang aplikasi-aplikasi baru Bank Lampung.
- Tanggapan dari Bank Indonesia, BI sebagai regulator IETPD juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembayaran menggunakan QRIS.
- Kesiapan lingkungan strategis OPD yaitu meliputi penyusunan perencanaan OPD, kesiapan aplikasi dan koneksi internet.

#### 4. BPKAD :

- Pertanyaan apakah aplikasi yang digunakan oleh BPPRD untuk dapat melihat wajib pajak yang sudah bayar membayar pajak maupun belum membayar pajak (Tunggakan pajak) ?

Tanggapan BPPRD sudah mempunyai sistem aplikasi online dengan nama Citigove dimana kita bisa mengecek tagihan Wajib Pajak.

#### 5. Dinas Kesehatan :

- Pertanyaan Dinas Kesehatan : Dinas Kesehatan memiliki 2 Retribusi yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Puskesmas apakah harus Digital juga menggunakan QRIS?

Tanggapan BPPRD : diharapkan seluruh OPD pengelola Retribusi menggunakan sistem pembayaran QRIS selain mempermudah pembayaran dan menarik minat bayar Wajib Pajak selain itu juga membantu OPD dalam sistem pencatatan.

#### **Kesimpulan Rapat:**

Dengan mempertimbangkan seluruh masukan yang disampaikan oleh peserta rapat, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kota Metro optimis menuju Kategori "Digital" dengan cara mempersiapkan perencanaan dan Rencana Kerja Anggaran oleh seluruh OPD pengelola Pajak dan Retribusi Daerah serta mensosialisasikan kepada masyarakat luas seluruh wajib pajak baik sosialisasi langsung ataupun melalui sosial media (Instagram, WA, Youtube dll) untuk mengenalkan dan melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kanal Digital (QRIS dan e-commerce).

2. Dengan dukungan Bank Lampung dan Bank Indonesia sebagai regulator dalam pengembangan IETPD (Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pendapatan Daerah) Kota Metro, diharapkan semua pembayaran pajak dan retribusi dapat dilakukan secara Digital, dimana Kota Metro sudah mempersiapkan pembayaran Pajak Asli Daerah melalui QRIS dan e-commerce (Tokopedia dan Indomart).
3. Aplikasi Pendukung Transaksi Non Tunai Pajak Daerah yang telah dipersiapkan BPPRD antara lain : SMARTGOV,CITIGOV, SIAPAD dan E-REKLAME, diharapkan seluruh OPD pengelola PAD mempersiapkan kesiapan Infrastrukturnya lingkungan strategisnya seperti aplikasi dan koneksi internet guna mendukung Kota Metro menjadi Kota Digital.

Demikian Notulen rapat ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak Walikota Metro dalam mengambil kebijakan terkait Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pendapatan Daerah Kota Metro Tahun 2022.

Mengetahui:  
Plh. Kepala BPPRD Kota Metro,



**MIRZA MARTA HIDAYAT, SE.,M.E**

Pembina

NIP. 19790313 200212 1 003

Notulis Rapat :  
JFT AKPD BPPRD Kota Metro,



**IIN INDRASWARI, S.Sos.,M.M**

Pembina

NIP. 19690829 200212 2 001